

## ABSTRAK

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di 33 provinsi di Indonesia antara tahun 2013 – 2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan program *SmartPLS* Versi 3.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat variabel yang telah diuji, secara parsial dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) dan tingkat pengangguran (TP), sedangkan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) dan tingkat pengangguran (TP), selain itu pertumbuhan ekonomi (PE) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran (TP) di 33 provinsi di Indonesia antara tahun 2013 – 2017.

Kata kunci : dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran.

## **ABSTRACT**

*The implementation of fiscal decentralization in the Reformation era officially began on January 1, 2001. The process began with the ratification of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Government and Law Number 25 of 1999 concerning Financial Balance Between Central and Regional Governments (PKPD). Until now, the two regulations have undergone several revisions to the latest Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance Between the Central Government and Regional Government.*

*The purpose of this study was to analyze the effect of special allocation funds, profit sharing funds on economic growth and unemployment rates in 33 provinces in Indonesia between 2013 - 2017. The data used are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. Data collected was analyzed using the SmartPLS Version 3.0 program.*

*The results of this study indicate that of the four variables that have been tested, partially the special allocation fund (DAK) has no effect on economic growth (PE) and unemployment rate (TP), while the profit sharing fund (DBH) has a significant effect on economic growth (PE) and the unemployment rate (TP), besides that economic growth (PE) has a significant influence on the unemployment rate (TP) in 33 provinces in Indonesia between 2013 - 2017.*

*Keywords: the special allocation fund, revenue-sharing, economic growth, unemployment rate.*

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA